

## **BAB II**

### **Sejarah, Perkembangan serta Dampak dari Konflik yang Terjadi antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Pemberontak FARC**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Pemerintah Kolombia dengan kelompok pemberontak FARC melalui sejarah konflik, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan secara umum yang mana dapat mempengaruhi kondisi stabilitas negara. Selain itu, akan dijelaskan juga bagaimana kebijakan pemerintah sebelumnya sebagai upaya negosiasi dengan FARC, hingga '*lesson learned*' sebagai poin pembelajaran yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan selanjutnya dalam memutuskan kebijakan baru menuju perubahan yang lebih baik di Kolombia. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana perkembangan konflik dan upaya penyelesaiannya dibawah peran Presiden Juan Manuel Santos pada kebijakan *Peace Talks Agreement* (PTA) dengan pihak FARC (2012-2016).

#### **2.1. Konflik Antar Pemerintah Kolombia dan Kelompok Pemberontak FARC**

Sebelum membahas mengenai kemunculan FARC dan bagaimana dampak yang ditimbulkan atas pemberontakan yang terjadi, maka perlu diketahui bahwa konflik yang terjadi di Kolombia sudah muncul dan mengakar sejak tercapainya kemerdekaan di Kolombia pada tahun 1819, bahkan mulai dari zaman penjajahan bangsa Spanyol. Kemunculan dari kelompok pemberontak FARC sendiri berawal dari kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut David Bushnell dalam *Handbook Series of Colombia a Country Studies, Chapter 1 Historical Setting: Early Colombia* (Bushnell, 2010: 4-6) disebutkan bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di Kolombia telah muncul sejak kehadiran bangsa Eropa khususnya Spanyol yang kemudian memiliki sebagian besar pengaruh di bidang politik, kesejahteraan ekonomi, dan penghormatan sosial di masyarakat. Sedangkan penduduk asli atau yang biasa disebut dengan Amerindian (*American-Indian*) kemudian terpinggirkan dan mengalami degradasi sosial di lingkungannya yaitu dengan dijadikan bawahan bagi para penjajah. Dominasi kekuasaan bangsa Spanyol yang terus berlanjut menciptakan strata sosial dalam kehidupan masyarakat Kolombia.

Hal tersebut baik disadari maupun tidak membawa kondisi sosial masyarakat Kolombia pada tingkat kedudukan yang berbeda. Dimana kesenjangan terjadi antara keturunan bangsa Spanyol sebagai masyarakat kelas atas, dengan penduduk asli Amerindian dan keturunan Afro (sebagai

pendatang) berada di masyarakat kelas bawah. Selain itu, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor pemicu yang melatarbelakangi kemunculan kelompok pemberontak FARC pada tahun 1960an dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi stabilitas di Kolombia. Pembentukan FARC sendiri berawal dari konflik politik yaitu peristiwa '*La Violencia*' (1948-1958) yang terjadi antara partai Konservatif dan partai Liberal.

FARC pada awalnya merupakan sebuah perkumpulan gerakan petani di pedesaan, kemudian bertransformasi menjadi kelompok bersenjata sayap kiri dibawah Colombian Communist Party (PCC). Tujuan awal dibentuknya FARC yaitu untuk menghapus '*Colombia's systemic social inequality*' atau ketidakadilan sosial sistemik yang terjadi di Kolombia (Beittel, 2015 : 1-4). Namun demikian, pada perkembangannya FARC kini telah bertransformasi menjadi kelompok pemberontak yang memanfaatkan tindakan kriminal sebagai salah satu sumber pendanaan bagi aktifitasnya dalam memperoleh kekuasaan di beberapa wilayah di Kolombia.

### **2.1.1 Akar Konflik Secara Historis**

Seperti yang telah disebutkan diatas, konflik yang terjadi di Kolombia pada dasarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan, atau bahkan sebelum kemerdekaan negara itu sendiri. Kemudian sebagai negara terbesar ke empat di Amerika Selatan, Kolombia merupakan negara yang dianggap dapat mencerminkan kompleksitas konflik yang didorong oleh berbagai macam faktor pendorong pemicu ketegangan di wilayahnya. Fernan E. Gonzalez dalam tulisannya yang berjudul *The Colombian Conflict in Historical Perspective* (2004: 10-15) menyebutkan bahwa terdapat dua fenomena bersejarah yang dianggap melatar belakangi konflik yang terjadi di Kolombia hingga saat ini. Fenomena tersebut dijelaskan sebagai berikut,

- 1.) ***The campesino colonization of peripheral areas***  
'*campesino*' berarti penduduk asli di Latin Amerika dan berada di '*rural areas*' atau wilayah pedesaan. Pada umumnya, penduduk di wilayah pedesaan tersebut bermata pencaharian sebagai buruh tani. Sejak masa kolonialisme Spanyol, wilayah pedesaan yang juga disebut sebagai '*peripheral areas*' ini dikenal sebagai wilayah yang terisolasi dan sulit untuk diakses.
- 2.) ***A gradual state-building process: the staggered incorporation of territories and populations resulted in an uneven state presence in the regions***  
Pasca penjajahan bangsa Spanyol, proses pembangunan Negara Kolombia dilakukan secara bertahap. Bersamaan dengan hal tersebut, proses penggabungan wilayah dan populasi yang diatur secara bergiliran menghasilkan kondisi ketidak merataan kehadiran negara pada pemerintah daerah.

Menurut Fernan E. Gonzalez, kedua fenomena tersebut telah mengakar sejak masa kolonialisasi bangsa Spanyol di Kolombia hingga sekarang ini. Hal ini dapat terjadi sebab, wilayah pinggiran atau *periphery* sejak awal abad ke-16 memang sudah terbentuk sebagai wilayah yang terisolasi dan sulit untuk diakses dan ditinggali oleh sejumlah kelompok marginal<sup>1</sup>. Terbaiknya wilayah *periphery* ini diperburuk dengan kehadiran negara di wilayah tersebut yang hanya dapat diwujudkan dengan kepemilikan lahan yang terkonsentrasi atau terpusat pada kelompok elit. Hal ini kemudian menciptakan tingkat hirarki sosial yang secara berturut-turut membentuk dasar kekuatan lokal dan regional yang terintegrasi kedalam jaringan nasional, yaitu melalui dua partai tradisional (partai konservatif dan partai liberal) serta institusi-institusi negara (www.c-r.org, 2004).

Kemudian permasalahan terus bergulir hingga terjadinya persaingan antara dua partai tradisional besar<sup>2</sup> yang mendominasi perpolitikan di Kolombia. Hal ini juga yang menjadi pemicu lain dalam memperkeruh konflik sipil di negara tersebut. Meskipun Kolombia diketahui sebagai salah satu negara demokrasi tertua di *western hemisphere* setelah Amerika Serikat, namun hal tersebut nyatanya tidak menghilangkan citra Kolombia yang dinilai sebagai negara yang lemah (Marcella & Schulz, 1999 : 213-228).

Penilaian atas lemahnya negara ini terjadi sebab pada periode tahun 1948-1958 Kolombia mengalami masa-masa kekejaman politik yang luar biasa dan ditandai dengan terbunuhnya tokoh Liberal Jorge Eliecer Gaitan (disebut dengan peristiwa *La Violencia*), dimana peristiwa tersebut mengakibatkan terbunuhnya sekitar 200.000 jiwa manusia (Segura & Mechoulan, 2017, hal. 5). Lebih daripada itu, Kolombia sejak dahulu memang sudah dikenal sebagai '*weak states*' atau

---

<sup>1</sup> Kelompok marginal yang dimaksud terdiri dari penduduk kulit putih golongan miskin; *mestizos* atau keturunan campuran (*mixed Spanish and indigenous heritage*); Afro-Colombian; dan *mulatos* keturunan campuran (*mixed whites or mestizos and African heritage*).

<sup>2</sup> Partai Konservatif dan Partai Liberal disebut-sebut sebagai dua partai besar di Kolombia sejak pertengahan abad ke-19. Yang mana keduanya menjadi ciri sistem politik elitisme dan dualisme partai politik yang paling konsisten saat itu. Hal ini berakibat pada terbatasnya akses atas hak-hak sipil dan politik dalam berpendapat, partisipasi politik kala itu hanya dapat dinikmati oleh dua partai tradisional ini secara bergantian tanpa adanya persaingan yang sehat dengan partai politik baru. Prinsip dari kedua partai tradisional ini merupakan prinsip loyalitas dan warisan keluarga dimana dapat dipastikan generasi penerusnya juga akan memperoleh '*prestige*' yang sama dengan para leluhurnya. Dennis M. Hanratty and Sandra W. Meditz. "*Government and Politics of Colombia: Political Dynamics*". <http://countrystudies.us>. Diakses pada November 2017.

negara yang lemah. Menurut ahli politik Fransisco Leal Buitrago dalam “*Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability*” (Chapter 1: Introduction, 2001: 1-2), ‘*weak states*’ yang dimaksud terjadi akibat buruknya tingkat integrasi nasional dan otonomi regional sehingga hal ini kemudian menjadi sebuah ciri khas lingkungan politik di Kolombia. Tidak ada satupun wilayah bagian provinsi atau daerah di Kolombia yang menonjol, atau memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk mendominasi wilayah lain. Akibatnya tidak ada pusat-pusat daerah atau perkotaan yang cukup dominan dalam bidang politik dan ekonomi (Rabasa & Chalk, 2001).

Selain itu menurut (Miranda, 2014 : 1-15) konflik sipil yang terjadi di Kolombia juga menyebabkan pemerintah kehilangan beberapa fungsinya, seperti ketidak efektifan pemerintah dalam menjalankan kendali atas wilayah negaranya, dan penegakan hukum negara. Ditambah dengan situasi konflik yang terjadi secara berlarut-larut, serta diiringi dengan kekerasan sistematis yang didorong atas motif politik yang termasuk di dalamnya yaitu, perdagangan narkoba ilegal, pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa ‘*social cleansing*’, dan lain-lain mengakibatkan Kolombia menjadi salah satu negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia terburuk pada saat itu.

Sehingga untuk mengakhiri konflik politik yang terjadi antara partai Konservatif dengan partai Liberal tersebut, maka pada tahun 1958-1974 terdapat suatu kesepakatan (*The National Front* 1958<sup>3</sup>) yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah Kolombia terbagi dan berlangsung dibawah partai Konservatif dan partai Liberal, dengan periode masa jabatan selama empat tahun yang dilakukan secara bergantian (Marcella & Schulz, 1999).

Ratih Herningtyas berpendapat dalam tulisannya yang berjudul *Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia* (2012: 22-37), bahwa kesepakatan kedua partai untuk membagi kekuasaan pemerintahan mengakibatkan terbentuknya sebuah kartel politik, yang mana hal tersebut tidak hanya berarti membangun monopoli kekuasaan tetapi juga menutup

---

<sup>3</sup> Catherine C. LeGrand dalam tulisannya “*The Colombian Crisis in Historical Perspective*”, Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies (2003), pp. 165-209. Menjelaskan bahwa kesepakatan yang disebut dengan *The National Front* pada tahun 1958 antara partai Konservatif dan partai Liberal dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap penyelesaian konflik politik di Kolombia. Kesepakatan tersebut justru hanya menciptakan demokrasi yang terbatas pada kaum *elitist*, serta pada perkembangannya menimbulkan kemacetan birokrasi, dan praktik-praktik *clientelism* dan korupsi yang semakin menjadi sehingga masyarakat Kolombia tidak dapat berekspresi politik secara independen.

kemungkinan bagi kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan akses atas partisipasi politik dalam sirkulasi pemerintahan (Herningtyas, 2012). Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut memang mampu menghentikan konflik politik antara kedua partai pada saat itu, namun pada perkembangannya koalisi politik diantara keduanya justru menimbulkan konflik baru yang muncul dan dirasakan oleh kelompok-kelompok lain yang tidak memperoleh kekuasaan di Kolombia. Kelompok yang termarjinalkan ini kemudian mulai mengorganisasikan gerakan perlawanan lengkap dengan pasukan bersenjata yang melakukan aksinya dengan bergerilya seperti, FARC (*The Revolutionary Armed Forces of Colombia*), ELN (*The National Liberation Army*), dan AUC (*The United Self-Defense Groups of Colombia*) (Herningtyas, 2012).

### 2.1.2 Sejarah Terbentuknya FARC

Era tahun 1960an merupakan masa-masa awal yang menandai bahwa seiring dengan berakhirnya peristiwa *La Violencia* yang juga diikuti dengan pergolakan kaum marjinal, terbentuklah kelompok gerilya yang mana momen tersebut juga sekaligus menandai dimulainya pergerakan pemberontakan di Kolombia yang dipengaruhi oleh ideologi Marxism-Leninism<sup>4</sup>. Dimana pasukannya beranggotakan kelompok komunis militan dan kelompok pembela tani, yang berbasis di wilayah pegunungan diantara Bogota dan Cali yang kemudian berkembang menjadi '*armed wing*' atau kelompok bersenjata yang beroperasi dibawah Colombian Communist Party (PCC) (Beittel, Peace Talks in Colombia, 2015).

Selanjutnya June S. Beittel juga menyebutkan bahwa di tahun 1964 kelompok pemberontak tersebut mendeklarasikan keberadaanya, yang hingga kini disebut sebagai FARC (*The Revolutionary Armed Forces of Colombia*). FARC muncul dengan fungsinya sebagai sebuah kelompok '*rural insurgency*' dan yang ditujukan untuk memperjuangkan hilangnya ketidakadilan sistemik di Kolombia. Dalam memperjuangkan aksinya, FARC pada awalnya memiliki sebuah program yang tujuannya yaitu untuk mewakili rakyat Kolombia, khususnya kaum '*the rural poor*'

---

<sup>4</sup> Menurut Georgios Xenokratis, dalam "*Rebels, Criminals or Both? The Role of Ideology in the Colombian Conflict*". Ideologi Marxism-Leninism yang dimaksud adalah, bahwa FARC bertindak sebagai '*professional revolutionary*' (gerakan kelompok revolusioner yang meluas hingga mencapai '*armed colonization*' di beberapa wilayah nasional Kolombia), serta dapat mendorong masyarakat pada sosialisme. Selain itu dijelaskan juga bahwa, FARC dalam aksinya sangat dipengaruhi oleh ideologi Marxis versi Stalin, yaitu yang lebih menekankan bahwa '*the capitalism survived through imperialism*' dan kondisi tersebut hanya dapat dilawan dengan mendirikan partai Komunis untuk menghapus keserakahan kaum proletar. SAIS-John Hopkins University, pp.07-19. [www.sais-jhu.edu/sites/default/files/2015](http://www.sais-jhu.edu/sites/default/files/2015). (2015). Diakses pada 17 September 2017.

atau para petani miskin demi kesejahteraan mereka atas diskriminasi klaim dan privatisasi sumber daya alam saat itu (Felter & Renwick, 2017).

Menyambung penjelasan Beittel, FARC saat itu juga berusaha untuk mengambil alih kekuasaan militer Kolombia dan secara bertahap selama beberapa dekade terus berkembang dengan menjadikan aktifitas kriminal (seperti perdagangan dan penyelundupan narkoba antar-negara, serta penyebaran aksi terror termasuk didalamnya penculikan dan penyanderaan korban dengan imbalan berupa uang tebusan) sebagai sumber untuk mendanai dan melebarkan kekuatannya (Beittel, Peace Talks in Colombia, 2015).

Jika melihat pada hakikat terbentuknya FARC, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya FARC memiliki hubungan yang saling bersinggungan dengan masyarakat di pedesaan yang termarginalkan oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik di Kolombia saat itu. Selain itu dilihat dari letak geografisnya, FARC sendiri utamanya bersarang atau menduduki basis wilayah di daerah dataran timur Kolombia yang berbatasan dengan Venezuela. Tidak hanya itu keberadaan FARC juga dapat ditemui di bagian sebelah barat daya wilayah provinsi Cauca, Valle del Cauca, dan Narino, selain itu juga berada di sebelah barat provinsi Choco dan Antioquia (www.insightcrime.org, 2017).

Pendanaan kegiatan FARC berasal dari aktifitas kriminal yang mereka lakukan (dalam artian konteks perolehan keuntungan FARC). Dengan melihat pada kondisi wilayah yang dikuasanya, maka dapat dipahami bahwa FARC memandang situasi tersebut sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lahan pertanian marijuana dan tanaman koka (bahan baku kokain).

Hal ini serupa dengan pernyataan Catherine C. LeGrand yang menyebutkan bahwa pada tahun 1960an hingga 1970an letak kekuatan FARC berada pada daerah kekuasaannya yang bertempat di '*rural areas*' atau wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan kekuasaan pemerintah Kolombia, dimana wilayah tersebut sangat cocok untuk menanam daun koka. Di tahun 1980an bersamaan dengan meluasnya perkembangan pasar ekonomi perdagangan narkoba internasional para kelompok tani di wilayah tersebut mulai membudidayakan tanaman daun koka untuk tujuan komersil (LeGrand, 2003).

Tidak hanya itu, menurut John Otis dalam Wilson Center Latin American Program Report: *“The FARC and Colombia’s Illegal Drug Trade”* (2014: 3-5), pada tahun 1982 pemimpin FARC mulai memungut pajak produksi dan penyelundupan narkoba untuk membiayai dan memperbesar kekuatan persenjataan kelompoknya. Dalam hal ini, FARC memberlakukan kebijakan pajak 10 persen per-satu kilogram koka, bentuk mentah kokain yang dihasilkan dari daun koka dan bahan kimia yang kemudian berubah menjadi bubuk kokain di laboratorium (Otis, 2014). Kelompok FARC juga diketahui memungut pajak untuk setiap perdagangan dan pengiriman ganja dan opium yang di distribusikan diluar daerah kekuasaan FARC. Kondisi ini cukup memperlihatkan bahwa, praktik pemungutan pajak yang dilakukan oleh FARC merupakan salah satu bentuk monopoli kekuasaan di bidang pertanian khususnya tanaman koka dan ganja. Kontrol kekuasaan yang secara penuh berada ditangan FARC ini semakin menguat dengan kondisi para petani pedesaan yang tidak punya pilihan lain untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Bahkan dalam hal ini FARC mengklaim bahwa aktifitas yang dilakukan oleh kelompoknya merupakan sebuah bentuk perlindungan dan perjuangan untuk merubah kondisi negaranya (Otis, 2014).

Kemudian pada tahun 1990an, terdapat sejumlah peristiwa yang menyebabkan meluasnya kekuatan FARC pada saat itu. Sebagai contoh, yaitu akibat yang ditimbulkan dari pecahnya kartel Medellin dan Cali dimana hal ini memicu kemunculan kartel generasi baru yang disebut dengan *‘mini-kartel’* atau kartel kecil. Kartel-kartel kecil ini tentunya masih memiliki kekuatan yang lemah, sehingga kemudian mereka berpaling kepada FARC dengan harapan bahwa FARC mampu melindungi operasi penyelundupan yang dilakukan oleh kelompoknya.

Selain itu kondisi pertanian koka di Peru dan Bolivia yang semakin mengalami penurunan aktifitas produksi dan distribusi mendorong FARC menjadi satu-satunya organisasi kriminal terkuat di kawasan Amerika Selatan. Pada saat itu pemerintah Peru melakukan operasi yang mengharuskan militernya untuk menggagalkan proses lalu lintas perdagangan narkoba jalur udara, termasuk muatan pasta koka dari Bolivia dan Peru ke laboratorium kokain di Kolombia. Akibatnya, sebagian besar tanaman koka di wilayah Andean dipindahkan ke wilayah hutan selatan Kolombia, yang mana FARC memainkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Pertanian koka di Kolombia pun mengalami lonjakan dari yang pada mulanya berjumlah ribuan hektar kemudian

meluas hingga lebih dari 400.000 hektar di tahun 2000, dimana menurut angka PBB dengan luasan sebesar itu Kolombia mampu memproduksi 680 ton kokain (Otis, 2014, p. 4).

**Tabel 2.1.**

Pertanian Koka di Wilayah Andean (1997-2002) dalam hektar (ha)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Bolivia</b>	45.800	38.000	21.800	14.600	19.900	24.400
<b>Peru</b>	68.800	51.000	38.700	43.400	46.200	46.700
<b>Colombia</b>	79.000	102.000	160.000	163.000	145.000	102.000
Total	193.600	191.000	220.500	221.000	211.000	173.100

Sumber: UNODC

*(United States Department of State & National Monitoring System Supported by UNODC: Colombia Coca Cultivation Survey, Juni 2005. [www.unodc.org](http://www.unodc.org))*

Lonjakan pertanian koka di Kolombia dapat dilihat pada (tabel 2.1) dengan memperhatikan pada periode tahun, dimana perbedaan luas wilayah pertanian koka di Kolombia pada tahun 1998 sebesar 102.000 ha, meningkat menjadi 160.000 ha di tahun 1999 dan terus bertambah hingga mencapai 163.000 ha pada tahun 2000. Kondisi ini berbeda dengan luas pertanian koka yang dimiliki Bolivia dan Peru, dimana terhitung sejak kurun waktu tahun 1998 hingga 2000 luas lahan pertaniannya mengalami penurunan yang signifikan. Jika melihat pada penelitian John Otis sebelumnya terkait penurunan aktifitas produksi pertanian koka di Peru dan Bolivia, maka data selama tahun 1997-2002 diatas menunjukkan perubahan pada berkurangnya lahan pertanian di kedua negara tersebut.

Sementara itu berkurangnya persaingan aktifitas produksi dan perdagangan koka di kawasan Amerika Selatan, berdampak pada lonjakan hasil panen yang diperoleh Kolombia. Pada (tabel 2.2) survei UNODC terkait potensi produksi tanaman koka global, di wilayah Amerika Selatan menunjukkan perolehan yang beragam. Dalam hal ini Kolombia justru semakin mengalami peningkatan pada jumlah produksi per metric (ton) sejak tahun 1997-2002. Sementara Peru dan Bolivia konsisten dengan penurunan jumlah produksinya. Peningkatan pada hasil panen Kolombia, tentunya dipengaruhi juga oleh luas lahan pertanian (tabel. 2.1) sebagai contoh



misalnya pada tahun 1997 dengan luas lahan sebesar 79.000 ha Kolombia hanya mampu memproduksi sebesar 350 ton koka. Sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 produksi koka Kolombia meningkat dengan hasil 680 ton di tahun 1999 dan 695 ton di tahun 2000. Hal ini tidak terlepas dari berkurangnya lahan pertanian koka di Peru dan Bolivia yang pada tahun-tahun tersebut hanya mampu memproduksi sebesar 175 ton / th.1999, 141 ton/ th.2000 untuk Peru; dan 70 ton/ th.1999, 43 ton/ th.2000 untuk Bolivia.

**Tabel 2.2.**

Potensi Produksi Tanaman Koka Global (1997-2002) dalam metric (ton)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Bolivia</b>	200	150	70	43	60	60
<b>Peru</b>	325	240	175	141	150	165
<b>Colombia</b>	350	435	680	695	617	580
Total	875	825	925	879	827	805

Sumber: UNODC

(UNODC: *Colombia Coca Cultivation Survey*, Juni 2005. [www.unodc.org](http://www.unodc.org))

Melihat pada peluang pasar persaingan aktifitas perdagangan koka di kawasan maka, dalam hal ini FARC benar-benar diuntungkan dengan kemampuannya melalui kontrol terhadap lahan pertanian koka. Tidak hanya itu, FARC juga selanjutnya mampu memperkuat kontrolnya atas kelompok petani serta memperluas basis sosialnya (Otis, 2014). Keuntungan yang diperoleh FARC melalui kelompok tani yaitu sebesar 10 persen dari hasil panen yang berlokasi dibawah wilayah kekuasaannya. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan Dea Miranda yang berjudul '*Strategi Counterinsurgency Kolombia terhadap FARC 2010-2012*' (2014:1-15), yang mana disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh FARC dari beban biaya pertanian koka yang dikenakan kepada para petani di sebagian *front* FARC yang beroperasi di lahan pertanian koka berat (yaitu sebesar 50 USD/ kilo dasar kokain, dan 200 USD/ kilo untuk setiap pembelian kokain dasar).

Selain itu dengan kekuasaan yang dimilikinya FARC juga menerapkan hukuman bagi setiap petani koka yang mencoba menjual hasil pertaniannya tanpa membayar pajak, serta hukuman tembak bagi pembeli yang membeli kokain dasar dibawah wilayah FARC tanpa izin

(Miranda, 2014). Hal ini tentunya meningkatkan resiko perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi para petani di '*rural areas*' dibawah kekuasaan FARC.

Untuk melancarkan aksi kriminal lainnya, FARC diketahui bekerja sama dengan kelompok teroris asing yaitu kelompok teroris *Basque ETA (Euskadi Ta Askatasuna)* di Spanyol. Kelompok ini berpengaruh dalam meningkatkan keahlian FARC untuk memainkan aksinya di wilayah kekuasaan mereka. Berdasarkan pada laporan yang ditulis oleh Benedetta Berti (2009), yang berjudul '*Colombia's FARC and the Basque ETA: Exploring the Tactical and Economic Partnership*' dalam (Miranda, 2014) disebutkan bahwa FARC dan ETA diketahui saling bertukar informasi dan mengadakan pelatihan bersama sejak tahun 2003 mengenai taktik gerilya dan produksi bahan peledak. Selain itu diketahui juga bahwa ternyata untuk melakukan pelatihan bersama dengan ETA, FARC melakukan pembayaran dengan cara menggunakan obat-obatan yang mereka produksi (jenis barang yang sama dengan yang mereka jual di Spanyol) (Miranda, 2014).

Pelatihan bersama yang dilakukan dengan ETA berakibat pada terjadinya serangan teror yang dilakukan oleh FARC dengan bantuan ETA di sebuah klub malam El Nogal, Bogota melalui bom mobil yang menewaskan sedikitnya 25 orang serta mengakibatkan 160 orang lainnya luka-luka. Selain itu juga investigasi terkait, mengungkap rencana aksi terorisme oleh FARC dan ETA di Madrid, Spanyol terhadap penduduk Kolombia yang menetap disana. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa aksi tersebut direncanakan tidak hanya untuk menebarkan aksi teror kepada masyarakat Kolombia yang berkedudukan di Spanyol, tetapi justru menasar pada kunjungan Presiden Kolombia ke Ibukota Spanyol, dimana target utamanya adalah Presiden Andres Pastrana, Wakil Presiden Fransisco Santos, mantan kandidat presiden Noemi Sanin, serta mantan anggota dewan Bernardo Guterrez (Berti, 2009).

Perkembangan FARC yang semakin mengarah ke tindakan kriminal, khususnya pada kasus perdagangan narkoba ilegal menjadikan kelompok ini sebagai kelompok yang sulit untuk ditundukkan. Selain itu hal ini juga dapat menunjukkan bahwa kompleksitas konflik yang terjadi di Kolombia membutuhkan komitmen yang kuat dari para pembuat kebijakan untuk dapat diselesaikan. Kehadiran pemerintah yang tidak merata pada setiap wilayah di Kolombia, khususnya wilayah-wilayah pedesaan yang merupakan kantong-kantong pertahanan FARC menjadi sebuah contoh kegagalan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang merata bagi seluruh rakyatnya.

### 2.1.3 Dampak-dampak Konflik

Selama 52 tahun sudah masyarakat di Kolombia menjalani kehidupan ditengah-tengah konflik dan ketegangan antara pemerintah dengan para kelompok pemberontak dan kelompok paramiliter lainnya. Selama 52 tahun itu juga kekejaman serta berbagai macam pelanggaran khususnya terhadap hak asasi manusia terjadi di Kolombia. Untuk dapat menjelaskan dampak-dampak apa saja yang dianggap menimbulkan kerugian atas konflik berkepanjangan tersebut, maka berikut penjelasan terkait perkembangan FARC yang semakin menuju kepada bentuk organisasi kriminal. Dimana aktifitas yang dilakukan diantaranya seperti, tindakan-tindakan kejahatan ‘*non-combatant killings, kidnappings, forced displacements, landmine casualties, child combatants, and other acts that left behind a large number of victims*’ (Isacson, 2014). Sejumlah aktifitas kriminal tersebut tentunya meninggalkan kenangan pahit bagi rakyat Kolombia serta memberikan kerugian bagi negara.

Berdasarkan pada laporan UNHCR tentang ‘*The State of the World’s Refugee, Chapter 7: Internally Displace Persons*’ disebutkan bahwa Kolombia merupakan salah satu negara yang menduduki tingkat ‘*internally displaced people*’ (orang-orang yang kehilangan tempat tinggal) tertinggi kedua setelah Sudan dalam kurun waktu tahun 2000an. Sebanyak 2.000.000 hingga 3.000.000 orang kehilangan tempat tinggalnya akibat konflik internal dengan kelompok pemberontak yang berkepanjangan di Kolombia. Pada tahun 1990 saja konflik bersenjata di Kolombia telah memakan korban jiwa sebanyak lebih dari 40.000 orang yang mana kebanyakan diantaranya yaitu masyarakat sipil Kolombia (www.unhcr.org, 2005).

Banyaknya jumlah korban yang tercatat kedalam *internally displaced persons* ini kemudian dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas konflik yang terjadi di Kolombia secara nyata telah merenggut hak-hak para korban. Dalam hal ini, Walter Kälin (2008) sebagai perwakilan sekretaris jenderal UNHCR: *Human Rights of Internally Displaced Persons*, menjelaskan bahwa pentingnya kepedulian komunitas internasional terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan para korban IDP seperti; (hak untuk memiliki tempat tinggal, tanah, mata pencaharian, dokumen milik pribadi, keluarga, serta kehidupan yang layak) menunjukkan bahwa para korban memiliki kebutuhan khusus yang amat serius dan perlu untuk segera diatasi. Sehingga dukungan komunitas internasional ini penting dan sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, komunitas internasional sebagai fasilitator juga berkewajiban untuk menyediakan akses, layanan, dan

jaminan perlindungan bagi tercapainya kebutuhan para korban tersebut. Kälin menambahkan, kondisi korban IDP ini berbeda dengan pengungsi atau *refugees* yang memperoleh jaminan dan perlindungan dari hukum internasional dibawah the 1951 *Convention on Refugees* dan 1967 *Protocol*. Tidak ada satupun perjanjian internasional yang mengikat pemenuhan kebutuhan hak para korban IDP, hal ini hanya sebatas anjuran dalam *the Guiding Principles on Internal Displacement* yang menyebutkan bahwa korban IDP mempunyai hak untuk tetap diakui sebagai bagian dari warganegara di negaranya (Ferris, 2008).

**Tabel 2.3.**

Jenis-jenis Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kolombia 2016

JENIS-JENIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SELAMA KONFLIK SIPIL DI KOLOMBIA					
NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH KORBAN	Civil and Political Rights	(Economic, Social, and Cultural) ESC Rights	KETERANGAN
1.	<i>Armed Conflict</i>	7.900.000 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas hidup</li> <li>• Hak untuk tidak disiksa</li> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> <li>• Separuh dari jumlah korban adalah wanita</li> </ul>
2.	<i>Forced Displacement</i>	6.900.000 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> </ul>
3.	<i>Mass Murderer</i>	267.000 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak untuk hidup</li> <li>• Hak untuk tidak disiksa</li> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> </ul>
4.	<i>Victims of possible extrajudicial executions</i>	4.392 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas hidup</li> <li>• Hak untuk tidak disiksa</li> </ul>
5.	<i>Enforced Disappearance</i>	46.386 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> </ul>

6.	<i>Abandonment</i>	29.622 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> </ul>
7.	<i>Victims of anti personnel mines and unexploded ordnance</i>	11.062 jiwa	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak untuk tidak disiksa</li> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> </ul>
8.	<i>Child soldiers used by paramilitaries and guerrillas group</i>	8.022 orang	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> <li>• Hak atas pendidikan</li> </ul>
9.	<i>Human rights defender and peasant farmer leaders</i>	63 orang / thn 2015; 52 orang / thn 2016	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas hidup</li> <li>• Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya</li> <li>• Hak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan</li> <li>• Hak kebebasan untuk berserikat</li> <li>• Korban pembunuhan diantaranya termasuk (<i>indigenous people, Afro-Colombian decendants, and peasant farmer leader</i>)</li> </ul>
10.	<i>Trade union members killed in 2015</i>	20 orang	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak atas kebebasan untuk berkumpul secara damai</li> <li>• Hak atas kebebasan untuk berserikat</li> <li>• Hak atas pekerjaan</li> </ul>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber<sup>5</sup>

<sup>5</sup> (Budiardjo, 2010), Amnesty International, UARIV (*Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas*), UNCHR Office di Kolombia, *The National Trade Union School*, dan *We are defenders programme*.

Sesuai dengan tabel diatas, Amnesty Internasional mengategorikan para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik di Kolombia kedalam 10 macam jenis pelanggaran yang tertera diatas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tercatat selama konflik berlangsung hingga pada tahun 2016. Pelanggaran juga dikategorikan berdasarkan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Berdasarkan pada kedua Kovenan tersebut, mayoritas pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya konflik cenderung melanggar pada prinsip-prinsip Hak Sipil dan Politik terutama terkait isu keamanan dalam hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas kebebasan dan keamanan diri.

Sejumlah tindakan kejahatan yang disebutkan diatas merupakan beberapa contoh faktor kompleksitas konflik yang semakin memperburuk kondisi stabilitas di Kolombia, dimana hal tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa proses penyelesaian konflik dengan kelompok pemberontak FARC bukanlah suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Meskipun bentuk-bentuk kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya bukan murni tindakan FARC saja (dalam artian kelompok pemberontak dan gerliya lainnya juga terlibat atas aktifitas tersebut), namun dampak atas kekerasan, dan kejahatan yang dilakukan oleh FARC menjadikan sebuah poin penting yang perlu untuk di evaluasi oleh pemerintah, apakah selama ini kebijakan yang berlaku sudah cukup efektif dalam mengurangi ketegangan di Kolombia, serta evaluasi tersebut juga penting bagi pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang sudah sepatutnya mampu hadir dalam masyarakat dan menjamin perlindungan keselamatan dan keamanan warga negaranya.

Dalam hal ini, pemerintah Kolombia pada prosesnya kemudian melakukan upaya negosiasi dengan kelompok pemberontak dengan harapan dapat meminimalisir dampak bahkan menyelesaikan konflik hingga tercapainya perdamaian di Kolombia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini telah dimulai dan diawali pada masa kepemimpinan Presiden Andres Pastrana dengan membuka pembicaraan pada tahun 1998 (Miranda, 2014:1-15).

## **2.2 Perkembangan Konflik Sebelum, dan Selama Masa Kepemimpinan Juan Manuel Santos (2012-2016)**

### **2.2.1 Upaya Pemerintah Sebelumnya pada *Peace Talks Agreement* sebagai Pembelajaran bagi Kebijakan Berikutnya**

#### **Belisario Betancur**

Administrasi pemerintahan dibawah Presiden Belisario Betancur berlangsung selama periode tahun 1982 – 1986, dibawah masa kepemimpinannya pemerintah Kolombia memulai inisiatif negosiasi damai dengan kelompok gerilya. Inisiatif ini sempat disurakan pada pidatonya semasa kampanye, dimana ia berjanji untuk membuka pintu demokrasi dan berupaya untuk berdamai dengan kelompok pemberontak (Dudley, 2004:15-16). Segera setelah ia menduduki kursi pemerintahan, Bentancur mengirimkan utusan ke wilayah kamp pertahanan FARC dan menawarkan upaya diskusi terkait perdamaian diantara kedua pihak. Niat tersebut disambut dengan baik oleh FARC yang disampaikan melalui salah satu anggotanya, dimana kedua pihak sepakat untuk mencari perubahan dari dalam sistem politik dengan mendirikan partai politik yang sah secara hukum sebagai bentuk representasi kelompoknya di dalam pemerintahan.

Pada tahun 1985 secara resmi partai Union Patriotica (UP) didirikan sebagai harapan baru kelompok pemberontak terhadap pemerintah Kolombia. Dengan berdirinya UP, maka kemudian hal ini menjadi sebuah penanda terpatahkannya sejarah kekejaman politik di Kolombia. Akses terhadap politik akhirnya dapat dirasakan oleh FARC dengan terwujudnya perubahan pada proses pemilihan pada saat itu.

Kebebasan FARC untuk mendirikan partai politik UP ini merupakan realisasi dari kesepakatan yang terjadi antara FARC dengan '*the Peace Commission of the Government of Republic Colombia*'. Dimana syarat dan ketentuan yang menjadi komitmen bersama kedua belah pihak tertuang di dalam '*the Uribe Agreement*' (1984) yang diantaranya mencakup sebelas poin agenda pembahasan kesepakatan. Terutama yaitu, terkait amnesti hukum pada proses gencatan senjata yang tidak disertai dengan demobilisasi angkatan bersenjata FARC. Hal ini dapat terwujud dengan syarat dibentuknya zona demiliterisasi kecil yang didirikan di wilayah pemerintah kota La Uribe, provinsi Meta (wilayah kekuasaan FARC). Selain itu, berdasarkan pada kesepakatan ketentuan gencatan senjata tersebut, maka FARC dan pasukannya hanya dapat menduduki



wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi kekuasaannya sejak sebelum disepakatinya *'the Uribe Agreement'*. Dengan disepakati dan ditandatanganinya *'the Uribe Agreements'* oleh perwakilan FARC, maka hal tersebut menandai terbukanya pintu demokrasi politik yang sebelumnya belum pernah terjadi di Kolombia pada saat itu (www.telesurtv.net, 2016).

*'The Uribe Agreements'* sendiri diketahui sebagai sebuah solusi politik untuk konflik bersenjata yang telah berlangsung lama (www.telesurtv.net, 2016). Solusi politik tersebut termasuk reformasi politik yang secara eksplisit diberikan kepada partai politik baru (dalam hal ini yaitu UP), yang nantinya akan digunakan sebagai media partisipasi politik dari gagasan-gagasan yang selama ini diyakini oleh kelompok pemberontak. Kesepakatan tersebut juga memasukkan komitmen politik pemerintah Kolombia yang mendukung diberikannya hak-hak politik para kelompok pemberontak dengan menaruh kepercayaan pada UP sebagai alat perubahan politik yang sah secara hukum.

Namun pada pelaksanaannya, *'the Uribe Agreements'* tidak mampu memenuhi harapan kedua belah pihak. Di tahun 1990 salah satu kandidat presiden yang dicalonkan oleh UP yaitu Bernardo Jaramillo dibunuh di Bandara Bogota. Kejadian tersebut menjadi sebuah tragedi besar yang menodai *'the Uribe Agreements'*, sebab kampanye dilakukan dengan melibatkan aksi pembunuhan dan teror terhadap pendukung UP, terlebih aksi tersebut dilakukan secara sistematis (www.telesurtv.net, 2016). Menurut LeGrand (2003:176), pembunuhan dan teror terhadap simpatisan UP ini dilakukan oleh *'the faceless killer'* yang diketahui diperintahkan oleh kelompok paramiliter baru, tentara, dan bahkan para politisi lokal. Lebih dari 2.000 orang yang berhubungan dengan UP dibunuh pada tahun 1980an hingga pada awal tahun 1990an, dan sejak saat itu UP kehilangan popularitas dan dukungan, sehingga keberadaannya kurang mampu untuk ikut berkontribusi pada kursi pemerintahan.

Sejak saat itu, publik Kolombia mengenal peristiwa ketidakadilan tersebut dengan sebutan *'violent democratization'*. Kegagalan yang terjadi sebab kesalahan pemerintahan Betancur ini dianggap tidak memberikan kesempatan bagi FARC untuk ikut berpartisipasi dalam politik negara. Bahkan pada mekanismenya *'the Uribe Agreements'* sendiri tidak cukup jelas dalam memantau partisipasi politik anggota FARC pada saat pelucutan senjata. Ketidakadilan ini diperburuk dengan pernyataan Jenderal (Purn) Fernando Landazabal yang menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap FARC itu dibenarkan dengan alasan

perlawanan pemerintah terhadap strategi politik bersenjata FARC. Sehingga yang terjadi pada saat itu adalah, kesalahpahaman antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Kolombia akibat seperangkat peraturan dan mekanisme hukum yang ternyata banyak dilanggar serta gagal dalam melindungi kebebasan berpolitik yang seharusnya ditaati sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada *'the Uribe Agreements'*. Kemudian hal ini juga mengakibatkan terbunuhnya sekitar 200 orang pada proses gencatan senjata (Gomez-Suarez & Newman, *Safeguarding Political Guarantees in the Colombian Peace Process*, 2013).

### **Andres Pastrana**

Presiden Andres Pastrana menduduki kursi pemerintahan pada tahun 1998-2002. Pada masa kepemimpinannya upaya negosiasi dengan kelompok pemberontak FARC dilakukan di tengah-tengah suasana perang, dan pembaharuan pembangunan negara. Kebijakan negosiasi perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Pastrana ini berbeda dengan beberapa model negosiasi sebelumnya. Menurut La Machaca (1999) dalam *Negotiation with the FARC: 1982-2002, Alternatives to war Colombia's peace process* model negosiasi kali ini dapat dikatakan sebagai *'agreement on reform of a new state'* yang menuntut kemajuan dan pembaharuan di Kolombia pada perubahan sektor ekonomi, politik, dan sosial, yang mana nantinya dapat tercipta suatu konsensus untuk mewujudkan pembaharuan pembangunan negara dibawah keadilan sosial serta melestarikan persatuan nasional (Gonzales Poso, 2004).

Agenda negosiasi tergabung kedalam 12 isu pembahasan, diantaranya terkait HAM, kebijakan pertanian (distribusi lahan yang dibeli dengan uang penjualan narkoba dan substitusi tanaman ilegal), sumber daya alam, revisi model perkembangan ekonomi-sosial, perubahan sistem hukum dan keadilan negara, perjanjian terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), redefinisi peran angkatan bersenjata dalam momen perdamaian, dan perjanjian internasional serta mekanisme demokrasi yang mengesahkan semua hal ini (Gonzales Poso, 2004).

Selain negosiasi dilakukan pada saat terjadinya perang, momen yang juga menjadi salah satu faktor pendorong kegagalan dari kebijakan ini yaitu berlangsungnya proses negosiasi pada kondisi dimana FARC yang sedang berada pada puncak popularitasnya. June S.Beittel (2015) berpendapat bahwa FARC pada saat itu sedang memegang kekuasaan yang sangat kuat, terlebih banyaknya stigma kekhawatiran di masyarakat akan lemahnya otoritas pemerintah Kolombia serta

kemungkinan kegagalan kembali pada proses negosiasi sebagai akibat dari tekanan kelompok pemberontak saat itu.

Catherine C. LeGrand (2003:178-179) mengumpulkan beberapa pendapat umum mengenai masa kejayaan dan kekuasaan yang diraih FARC pada saat itu. Pertama, FARC mempunyai kekuasaan yang kuat baik di wilayah baru maupun bekas wilayah koloni Spanyol. Sebagaimana yang diketahui, bahwa sejak awal pendudukan wilayah FARC (khususnya pada *'rural areas'*) tidak pernah ditemukan adanya kehadiran pemerintah lokal atau jika ada, kehadirannya pun kurang signifikan dalam mewujudkan perubahan di masyarakat *'rural areas'*. Sehingga kemudian kelalaian pemerintah yang mengabaikan wilayah pedesaan menjadi peluang tersendiri bagi kelompok FARC dalam memperbesar kekuasaannya. Dengan begitu, secara mutlak FARC lebih menguasai wilayah tersebut dengan terbukanya akses sebagai pemerintah bayangan dimana peran pemerintah lokal dapat tergantikan oleh kehadirannya. Kontrol wilayah yang dipegang oleh FARC diperkirakan sebesar sepertiga seluruh wilayah pedesaan di Kolombia.

Kedua, dampak dari berkembangnya produksi koka yang berada dibawah kelompok gerilya sejak tahun 1980an dan hubungannya dengan pergerakan sosial, seringkali dipertanyakan oleh para pengamat apakah kelompok pemberontak yang menguasai beberapa teritori tersebut benar-benar merepresentasikan masyarakat di wilayah kekuasaannya itu. Kontrol wilayah dibawah kekuasaan FARC memang dianggap mendukung para petani miskin untuk bertahan hidup dari pelanggaran batas oleh pemilik lahan pertanian. Namun dibandingkan dengan hal tersebut kelompok pemberontak dan kelompok paramiliter sebenarnya saling bersaing untuk memperoleh kekuasaan atas kontrol teritori sebagai cara untuk dapat memegang kontrol atas masyarakat dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Persaingan anantara kelompok pemberontak dan kelompok paramiliter ini terjadi pada tahun 2000, dimana *United Self Defense Forces of Colombia* (AUC) sebagai kelompok paramiliter memperebutkan kekuasaan atas teritori atau wilayah pada Provinsi Putumayo yang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan pertanian koka. Kelompok AUC juga diketahui menjalin hubungan dengan *'drug traffickers'* dan pemilik lahan yang merasa dirugikan atas pajak, pemerasan, dan penculikan. Perselisihan Antara AUC dengan FARC seringkali hanya terkait kontrol atas pertanian koka dan jalur perdagangan koka (Otis, 2014).

Kemudian pelaksanaan negosiasi dengan pihak FARC dilakukan di wilayah *demilitarised zone* (DMZ) yang sangat luas, yang mencakup lima wilayah di bagian provinsi '*south-central department*' yaitu diantara wilayah Meta dan Caquetta. Hal ini kemudian menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah Kolombia, sebab pada prosesnya kelima wilayah tersebut merupakan daerah murni kekuasaan FARC. Dimana sejak awal terbentuknya wilayah tersebut, tidak pernah terlihat adanya keterlibatan pemerintah lokal sebagai pelaku otonomi daerah. Sehingga pemerintahan Presiden Pastrana saat itu tidak mampu mengembalikan kondisi, dan pada akhirnya presiden memerintahkan penutupan atas wilayah DMZ serta memerintahkan para tentara militer untuk mengambil alih wilayah tersebut dari tangan FARC (Beittel, Peace Talks in Colombia, 2015).

Kegagalan atas negosiasi tersebut dianggap telah mengecewakan masyarakat dan menyebabkan tersebarnya dukungan untuk mengadopsi pendekatan dengan cara yang lebih keras atau '*hardline approach*' dalam struktur keamanan negara seperti yang dijanjikan oleh Alvaro Uribe sebagai kandidat Presiden pada kampanye untuk pemilihan selanjutnya.

### **Alvaro Uribe Velez**

Kemunculan aktor baru seperti pada masa kepemimpinan Alvaro Uribe pada tahun 2002-2006 dalam perpolitikan di Kolombia seolah menghadirkan suasana baru dalam pemerintahan. Pada masa kampanyenya, Uribe menekankan bahwa dirinya akan memperbaiki kondisi keamanan nasional dengan melakukan sejumlah perubahan pada keseimbangan kekuatan di tubuh militer dengan tujuan untuk mengalahkan kekuatan kelompok gerilya. Inisiatif Presiden Uribe ini muncul berdasarkan pertimbangan kegagalan pada pemerintahan Presiden Pastrana.

Menurut Thomas A. Marks seorang Profesor (*Terrorism, Insurgency, dan Counterinsurgency*) pada SNSEE (*School for National Security Defense University*), kurangnya kepemimpinan Presiden Pastrana didalam pemerintahan selama bertahun-tahun menyisakan permasalahan keamanan tersendiri bagi tentara nasional Kolombia (COLAR atau *Colombian Army*). Negara dengan kata lain, tidak ikut terlibat didalam strategi *counterinsurgency* atau kontra pemberontakan (Marks, 2011: 44).

Kemudian untuk merealisasikan misinya dalam memperbaiki kondisi keamanan nasional, dikeluarkanlah kebijakan yang dikenal dengan '*democratic security*' atau *Democratic Security and*

*Defense Policy* (DSP). Kebijakan DSP didefinisikan sebagai “*a framework document by which the National State outlines the basic tenets of democratic security to protect the rights of Colombians and strengthen, with the solidarity of the citizenry, the rule of law and democratic authority which is under threat*” (DeShazo, Mandelson F., & McLean, 2009: 18), yang berarti sebuah kerangka dokumen dimana negara menguraikan prinsip-prinsip dasar ‘*democratic security*’ untuk melindungi hak-hak rakyat Kolombia dan memperkuat, solidaritas warga negara, kewenangan dan aturan hukum demokratis yang berada dibawah ancaman.

Ancaman terhadap demokrasi di Kolombia yang dimaksud adalah ketidakmampuan pemerintah yang selama ini kurang menegaskan wewenang dari tiap institusi di keseluruhan negara, dan untuk melindungi rakyat dari ancaman kelompok organisasi bersenjata ilegal (DeShazo, Mandelson F., & McLean, 2009:19). Sehingga menjadi jelas bahwa tujuan utama dari kebijakan DSP yaitu untuk melindungi dan menjamin keamanan seluruh rakyat Kolombia, dengan kerjasama antara pemerintah dan rakyat melalui keikutsertaan golongan elit<sup>6</sup> dalam menanggung beban anggaran kebijakan yang dikenakan pada penambahan biaya wajib pajak (atau ‘*democratic security tax*’).

Kebijakan DSP selanjutnya menggabungkan upaya *counternarcotics* dan *counterterrorism* dalam pendekatan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk menegaskan kontrol pemerintah Kolombia sebagai negara terhadap seluruh wilayah nasional (Beittel, 2015:6). Terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok FARC, Presiden Uribe lebih mengacu pada upaya ‘*counterterrorism*’ atau ‘*counterinsurgency*’ hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melumpuhkan kekuatan kelompok gerilya, serta menghilangkan ancaman dari pemberontak. Pada tahun 2003 pemerintah melancarkan operasinya yang disebut dengan Plan Patriota, dimana operasi tersebut merupakan serangan terbesar dengan mengerahkan 18.000 pasukan tentara di provinsi Caqueta, Meta, Putumayo, dan Guaviare untuk menyerang wilayah blok timur dan selatan, yang mana wilayah tersebut merupakan basis struktur kekuatan FARC (International Crisis Group, 2012)

---

<sup>6</sup> Berdasarkan pada tulisan Peter DeShazo, Johanna Mandelson F., & Phillipe McLean. *Countering Threats to Security and Stability in a Failing State: Lessons from Colombia / Chapter 4: “The Uribe Administration, 2002 – ”*. CSIS Report pp.18-37. Washington D.C. (2009). Golongan elit yang dimaksud yaitu mengacu pada kelompok atau individu yang memiliki asset berjalan atau kekayaan, dan perusahaan yang bernilai lebih dari 50.000 USD yang nantinya akan mengalami kenaikan nilai mencapai 800 juta USD. ‘*Democratic security tax*’ menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan pemerintah disamping dana bantuan dari Amerika Serikat, perolehan pajak akan di alokasikan pada anggaran pertahanan selama periode empat tahun.

Rencana yang telah disiapkan oleh Presiden Uribe ini dianggap mampu menghentikan sejumlah perlawanan yang dilakukan oleh FARC. Kebijakan DSP dinilai berperan penting dalam pelaksanaan operasi ini, sebab reformasi pada badan-badan militer di Kolombia, seperti pada tahun 2002 dimana pasukan militer yang hanya berjumlah sekitar 132.000 orang (Beittel, *Peace Talks in Colombia*, 2015, p. 12), kemudian mengalami peningkatan jumlah personel hingga pada tahun 2010 jumlah pasukan militernya mencapai, 283.000 orang untuk COLAR, dan 159.000 orang untuk pasukan kepolisian nasional. Penambahan jumlah personel militer berkaitan dengan efektivitas pelayanan pemerintah dalam melindungi keamanan masyarakat, terlebih dalam kurun waktu setahun yaitu 2002-2003 pasukan tentara dan polisi mampu membunuh sebanyak 1.211 orang anggota FARC, dan menangkap 2.363 orang anggota FARC pada operasi Plan Patriota (International Crisis Group, 2003).

Pemerintah yakin bahwa dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan pada institusi publik dan demokrasi, maka legitimasi negara akan meningkat dan secara bersamaan sistem pemerintahan selain demokrasi dapat terabaikan (Mason, 2010, p. 346). Kebijakan DSP dan operasi Plan Patriota merupakan serangan yang berdampak signifikan terhadap pelemahan organisasi FARC. Pada awal tahun 2008, anggota FARC mengalami penurunan jumlah personel dari yang awalnya berkisar antara 18.000 hingga 21.000 orang menjadi 10.000 orang (melalui operasi militer berkala yang dilakukan pada kamp-kamp pertahanan atau wilayah kekuasaan FARC) (Mason, 2010, p. 347).

Sementara itu, terdapat pula sejumlah kesalahan yang terjadi didalam kebijakan dibawah pemerintahan Presiden Uribe, salah satunya yang mendapat banyak kritik yaitu terkait upaya negosiasi antara pemerintah dengan pihak kelompok paramiliter AUC yang terlibat kedalam praktik perdagangan narkoba, dan juga pada ketidakmampuan proses perdamaian untuk mengungkap organisasi paramiliter secara efektif (Hanson & Penna, 2004). Berdasarkan pada artikel tulisan Maria Alejandra Silva, '*Alvaro Uribe: The Most Dangerous Man in Colombia Politics*' (www.coha.org , 2017) menyebutkan bahwa publik Kolombia selama ini telah terkelabui oleh pencapaian Uribe, diketahui bahwa pemerintahannya dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan citranya di masyarakat. Penyadapan rahasia, korupsi, dukungan secara terang-terangan terhadap kelompok paramiliter sayap kanan, dan pelanggaran

hak asasi manusia yang parah menjadi sederet kekurangan yang seharusnya membutuhkan evaluasi lebih mendalam.

Kesalahan yang terburuk yang pernah dilakukannya yaitu pada ketidak selarasan dalam merancang aturan '*Colombia's Justice and Peace Law*' atau hukum perdilan dan perdamaian yang bertujuan untuk mendemobilisasikan atau melumpuhkan kelompok paramiliter, serta permintaan pertanggung jawaban atas perbuatan mereka. Undang-undang yang terdapat didalam aturan tersebut memberikan amnesti hukum bagi kelompok paramiliter secara *de facto*, akibatnya sistem peralihan dan perdilan substansif bagi kelompok paramiliter tidak dapat dijelaskan dengan baik dan hal tersebut justru memicu munculnya kelompok *Bandas Criminal* (BACRIM) organisasi perdagangan narkoba yang kemudian menjadi ancaman baru bagi keamanan di Kolombia (www.coha.org , 2017). Terdapat pula satu pelanggaran yang paling mengerikan, yaitu skandal pembunuhan terhadap ribuan anggota pasukan FARC yang dikenal dengan '*false positive*' dimana, pasukan militer Kolombia diperintahkan untuk membunuh setidaknya 5.000 orang warga sipil yang diubah penampilannya menyerupai kelompok gerilya dengan mendapat kompensasi bonus dari pemerintah.

Sejumlah kebijakan diatas merupakan peristiwa bersejarah yang dilakukan pemerintah Kolombia untuk memperbaiki kondisi stabilitas negaranya. Program dan upaya-upaya sebelumnya tentunya dapat melandasi pemikiran Presiden Juan Manuel Santos untuk menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Selanjutnya, meskipun tidak banyak kebijakan yang memperoleh keberhasilan namun, kegagalan yang terjadi selama masa perundingan dengan FARC tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi Presiden Juan Manuel Santos dalam menentukan pola pendekatan yang lebih baik dengan pihak oposisi. (Beittel, *Peace Talks in Colombia*, 2015) menyimpulkan kendala yang dialami pemerintah dalam proses perundingan sebelumnya, yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Belisario Betancur (1982-1986) dan Presiden Andres Pastrana (1998-2002) sebagai berikut,

1. Proses integrasi kelompok pemberontak kedalam demokrasi politik di Kolombia terbilang tidak pasti dan membutuhkan jaminan yang lebih efektif. (Dalam artian perlindungan jaminan politik untuk menghentikan aktifitas anggota FARC tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kolombia, yang mana disebabkan oleh penggunaan kekerasan pada proses demobilisasi kekuatan FARC saat itu).
2. Kondisi kekuatan FARC yang pada saat itu sedang berada di puncaknya menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kolombia untuk mencapai proses negosiasi. Selain itu, terjadi pelanggaran komitmen oleh FARC dengan penyalahgunaan zona demiliter (*demilitarized zone*) atau DMZ yang terletak di wilayah Caguán sebagai lokasi pertahanannya dengan kembali membentuk pasukan militer,

meluncurkan serangan kekerasan, menumbuhkan lahan pertanian *coca* (bahan baku kokain) pada skala besar, dan melakukan penyanderaan. Akibat kondisi tersebut publik Kolombia merasa dikecewakan dan memilih untuk mendukung pendekatan dengan cara yang lebih keras (*hardline approach*).

Selanjutnya, atas pertimbangan kegagalan proses perdamaian dengan kelompok pemberontak FARC, maka (Gomez-Suarez & Newman, 2013:826) menyebutkan usaha yang dilakukan oleh Presiden Santos saat ini dilakukan dengan mengacu pada *'the triangle of lesson learnt from previous peace processes'* yang mencakup,

- 1) Perundingan harus dilakukan diluar wilayah Kolombia;
- 2) Gencatan senjata hanya akan dilakukan selama implementasi di akhir perjanjian;
- 3) Pelaksanaan negosiasi harus dibatasi dengan lima poin agenda (pembangunan agraria, partisipasi politik, mengakhiri konflik, perdagangan narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban) yang disepakati pada 26 Agustus 2012.

Ketiganya merupakan poin-poin utama untuk membatasi jangkauan pembahasan pada proses negosiasi pemerintah Kolombia dengan FARC. Selain itu, ketiganya menjadi penting dalam strategi negosiasi Presiden Santos agar kesalahan pada kesepakatan negosiasi dibawah masa kepemimpinan Presiden Pastrana tidak kembali terulang. Pihak pemerintah dan FARC dalam pelaksanaannya, tetap berpegang pada ketiga poin atau *'triangle conflict-agenda'* pada *Exploratory Talks* di Havana, Kuba.

Menurut Andrei Gomez-Suarez dan Jonathan Newman (2013:826) dengan menjaga negosiasi tetap berpegang pada *'triangle conflict-agenda'* maka fokus dalam proses negosiasi dapat terjaga, sehingga dapat membatasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat memperkuat legitimasi perundingan melalui *'system of cross-witnessing'* yaitu pernyataan atau kesaksian kedua belah pihak. Presiden Santos dan FARC dalam hal ini memperluas pernyataannya, terkait perlunya untuk menekankan pentingnya dukungan dari dalam masyarakat Kolombia dan dari Internasional. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi asumsi-asumsi yang beredar, sehingga perlu disampaikan bahwa perundingan kali ini tidak patut untuk di ragukan. Sebab kedua belah pihak menjamin, 1) Tim negosiasi menghormati kesepakatan yang dihasilkan pada perundingan di Havana; dan 2) Mencegah beredarnya stigma ketidakpercayaan diantara saksi-saksi kolektif segera setelah dimulainya perundingan damai; sehingga pelaksanaan negosiasi dapat tetap berjalan pada koridornya tanpa memperoleh gangguan dari pihak-pihak lain. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan *Exploratory Talks* di Havana, Kuba harus dilakukan secara tertutup dengan didampingi oleh tim negosiasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.



### **2.2.2 Peran Juan Manuel Santos pada *Peace Talks Agreement* (2012-2016)**

Sejak masa kepemimpinan Presiden Alvaro Uribe di tahun-tahun terakhir pada 2010, sebelum kemudian digantikan oleh kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos, Kolombia telah mengalami cukup banyak perubahan yang terus menerus menuju pada proses mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian. Presiden Santos sendiri merupakan presiden terpilih ke-32, dan berasal dari Social Party of National Unity dengan ideologi Liberal-Conservatism. Sebelumnya pada periode tahun 2006-2009 Juan Manuel Santos pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional dibawah kabinet pemerintahan Presiden Alvaro Uribe.

Memasuki fase-fase awal pemerintahannya, Presiden Santos sempat menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan agresif dan melanjutkan kampanye melawan pimpinan FARC beserta para komandannya (Beittel, 2015). Meskipun begitu, menurut analisis lembaga konsultasi kebijakan di Bogota, Roman D. Ortiz & Janneth Vargas pada proses kali ini negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Santos mempunyai cara yang berbeda dibandingkan dengan *Peace Talks Agreement* (PTA) sebelumnya. Hal ini dapat terjadi sebab, kondisi administrasi negara dibawah kepemimpinan Santos saat itu sedang berada pada posisi yang kuat, baik secara strategis dan politik terhadap kelompok pemberontak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya legitimasi yang kuat dalam struktur administrasi institusi negara.

Sebagai contoh yaitu, melalui dukungan pemerintah terkait pemulihan kerugian yang diberikan kepada para korban kekejaman politik; ganti rugi pencurian kepemilikan lahan; serta, perang melawan kemiskinan yang kemudian mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah semakin mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan akibat kondisi sosial yang dirasakan masyarakat sebagai dampak dari konflik yang penuh dengan kekerasan (D. Ortiz & Vargas, 2013). Sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut faktanya cukup meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal jaminan perlindungan. Dengan ini, dukungan masyarakat kepada pemerintah pun diharapkan juga dapat mengalami peningkatan.

Sementara itu, kondisi FARC saat itu semakin mengalami kemunduran akibat aksi terorisme, penculikan, serta aksi-aksi kriminal yang secara sistematis mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan tidak lagi menjadi hal yang populer, bahkan di lingkungan masyarakat pedesaan sekalipun. Sedangkan pada level regional dan internasional, FARC

semakin kehilangan akses dengan partner kriminalnya di negara lain, dengan begitu FARC juga semakin kehilangan pamornya di kalangan kelompok organisasi kriminal pada level internasional. Hal ini terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia pada kamp salah satu pimpinan FARC yaitu Raul Reyes (salah satu pimpinan sekretariat FARC) berakibat pada kematiannya di tahun 2008. Kamp tersebut merupakan basis pusat informasi penting bagi FARC yang menghubungkan jaringan-jaringan organisasi kriminal di kawasan Amerika Latin dan Eropa (D. Ortiz & Vargas, 2013). Serangan juga dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 yang juga mengakibatkan tewasnya dua orang pimpinan sekretariat FARC lainnya yaitu Mono Jojoy dan Alfonso Cano. Ketiga orang pimpinan tersebut merupakan figur pemimpin yang kuat dalam organisasi kriminal FARC, hal ini diperburuk dengan disusulnya kematian pimpinan tertinggi yaitu Tirofijo yang semakin memperlemah struktur organisasi di jajaran pemimpin FARC. Selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2011 pemerintahan Santos sedikit banyak diuntungkan oleh kebijakan serangan militer yang dilakukan oleh pemerintahan Alvaro Uribe sebelumnya, dan hal tersebut terbukti sempat melemahkan kondisi keorganisasian FARC (Segura & Mechoulan, 2017 : 9-10).

Presiden Santos kemudian melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk mengawali diskusi dengan pihak FARC, dan dengan segera pemerintah juga semakin mendorong dilakukannya PTA baru secara bersyarat melalui persetujuan kedua belah pihak dengan membagi proses negosiasi kedalam tiga tahap, yaitu 1) tahap persiapan; 2) tahap terminasi konflik; dan 3) tahap transformasi konflik (Herbolzheimer, 2016). Tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2010 dan disebut dengan '*the Informal and Confidential Talks*' dengan pihak FARC. Diskusi ini dilakukan secara tertutup dan rahasia, yang nantinya berujung pada kesepakatan kerangka perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2012 (Segura & Mechoulan, 2017: 9-10).

*'The Informal and Confidential Talks'* merupakan diskusi yang diawali dengan upaya Presiden Santos yang secara rahasia menyampaikan surat kepada pimpinan FARC melalui Henry Acosta (seorang ahli ekonomi yang telah memfasilitasi terjalannya komunikasi antara pihak pemerintah Kolombia dengan FARC sejak masa kepemimpinan Presiden Alvaro Uribe), yang berisi undangan kepada dua orang representasi FARC untuk bertemu dengan dua orang perwakilan diplomatik pemerintah Kolombia, dan memulai diskusi secara rahasia. Pertemuan

diantara keempat perwakilan tersebut terjadi pada bulan Maret hingga Oktober tahun 2011, dan bertempat di wilayah perbatasan Kolombia-Venezuela dan di salah satu pulau di Venezuela (Segura & Mechoulan, 2017 : 10-14). Proses diskusi tersebut juga membahas mengenai dipilihnya Norwegia dan Kuba sebagai negara penjamin atau ‘*guarantor countries*’ selama proses perundingan damai berlangsung. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan kedua belah pihak terkait pentingnya kontribusi positif yang diberikan oleh kedua ‘*guarantor countries*’ dalam menjaga suasana proses perundingan secara damai dan kondusif.

Kuba dipilih dengan pertimbangan peran pentingnya dalam mengantarkan FARC ke meja perundingan. Sebagaimana yang diketahui bahwa FARC memiliki kedekatan tersendiri dengan Kuba melalui ideologi marxisme, termasuk aksi-aksi pemberontakan FARC yang banyak dipengaruhi oleh Fidel Castro<sup>7</sup>. Selain itu, Kuba dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh kelompok pemberontak di Kolombia baik FARC maupun ELN, yang mana prinsip kepercayaan tersebut menjadi faktor penting pada pencarian dialog dengan negara Kolombia (Dario, 2014 : 8-10). Sedangkan pemilihan negara Norwegia diputuskan oleh pemerintah Kolombia dengan menekankan pada pengalaman dan kemampuan Norwegia pada proses resolusi konflik, serta para diplomat Norwegia yang dikenal memiliki pengetahuan yang luas terkait dinamika konflik dan sejarah negosiasi. Selain itu, Norwegia juga diketahui sebagai negara yang sejak dahulu berkomitmen untuk memberikan praktik bantuan dan dukungan mediasi, serta pelaksanaan resolusi konflik secara damai (Dario, 2014 : 8-10).

Pelaksanaan dari diskusi rahasia tersebut kemudian diumumkan ke publik oleh Presiden Santos di tahun 2012, setelah kerangka perjanjian perundingan damai disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pada artikel yang berjudul “*Colombia and FARC: Talking about Talks*” dalam laman berita Economist yang dikutip oleh (Beittel, 2015), Presiden Santos menjelaskan bahwa kesalahan yang terjadi pada upaya negosiasi di masa lalu tidak akan terulang kembali yang mana saat ini tujuan dari diadakannya diskusi tersebut adalah untuk mengakhiri konflik, dan bahwa pihak militer Kolombia tidak akan menyerahkan wilayah

---

<sup>7</sup> Menurut June S. Beittel, dalam “*Peace Talks in Colombia*”, CRS Report (2015), pp.06.

Pada tahun 1960an sejumlah kelompok beraliran kiri terinspirasi oleh Revolusi Kuba, kelompok ini menuduh pemerintah pusat mengabaikan daerah pedesaan sehingga berdampak pada kemiskinan dan kepemilikan tanah yang terkonsentrasi. Kelompok-kelompok ini membentuk organisasi gerilya untuk menentang kekuasaan negara hingga berujung pada konflik sipil yang diikuti dengan tindakan kekerasan yang berlarut-larut selama setengah abad.

manapun sebagai zona demiliter (DMZ) ataupun menarik kembali pasukannya dalam perlawanan terhadap kelompok bersenjata ilegal.

Kemudian pihak FARC melalui pemimpinnya yaitu Timoleon Timochenko, mengkonfirmasi bahwa diskusi formal akan dilaksanakan di Oslo, Norwegia pada bulan Oktober tahun 2012 dan selanjutnya akan dilaksanakan di Havana, Kuba (Beittel, 2015 : 17-18). Pelaksanaan diskusi ini didampingi oleh tim negosiasi yang dipilih sebanyak lima orang pada masing-masing pihak dari 30 anggota tim, dan kelimanya merupakan aktor-aktor yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat Kolombia. Selanjutnya selama proses negosiasi berlangsung, kedua pihak mengadopsi sebuah peraturan umum yang menyebutkan “*nothing is agreed until everything is agreed*” yang diartikan bahwa tidak ada kesepakatan yang disepakati sampai semuanya disepakati. Hal ini dilakukan untuk menjaga fleksibilitas kedua belah pihak dalam menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu yang terus berubah-ubah, terlebih selama proses diskusi berlangsung pemerintah Kolombia dengan tegas menyatakan bahwa *Peace Talks* akan dilakukan tanpa gencatan senjata sekalipun. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan dan tekad pemerintah kepada FARC, dan juga pada pendapat publik serta sektor keamanan (Herbolzheimer, 2016).

Setelah diskusi formal selesai dijalankan maka kedua belah pihak telah menyepakati beberapa isu-isu substansif yang nantinya akan dibahas dalam tahapan ketiga, yaitu tahap transformasi konflik yang dilakukan secara berkala terhitung sejak disepakatinya kerangka perjanjian pada tahun 2012 hingga tercapainya kesepakatan akhir di tahun 2016 lalu. Menurut June S.Beittel (2015:18) selama proses pelaksanaan tahap ketiga berlangsung, kedua belah pihak sepakat untuk membahas isu-isu seperti:

1.) Pembangunan wilayah pedesaan dan kebijakan lahan pertanian;

Merupakan isu yang menjadi perhatian FARC, dalam hal ini berkaitan dengan ideologi FARC yaitu Marxism-Leninism. Seperti yang diketahui bahwa konflik Kolombia secara luas dianggap sebagai hasil dari ketidaksetaraan, pengucilan politik, dan negara yang lemah dan korup sementara perdagangan narkoba dan keterlibatan aktor internasional semakin memperpanjang durasi kekerasan disana (Xenokratis, 2015, p. 8). Terlebih konsep Marxism yang dipandang sebagai jawaban atas problematika ketidaksetaraan tersebut menjelaskan adanya konflik antar kelas di dalam negara, dan dengan mengedepankan kepada hak-hak kaum marginal diharapkan masalah terkait distribusi lahan pertanian dan pembangunan pada wilayah pedesaan dapat terselesaikan dengan baik. FARC merasa berhak dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak rakyat khususnya di wilayah pedesaan dalam memperoleh pemerataan pembangunan di bidang pertanian melalui kepemilikan lahan yang tidak lagi hanya dikuasai oleh golongan elit.

## 2.) Partisipasi politik FARC di pemerintahan;

Berawal dari sistem perpolitikan di Kolombia yang dicirikan dengan lemahnya kondisi negara dan ketidaksetaraan yang terstruktur. Kedua elemen ini membentuk pembatas bagi partisipasi politik masyarakat kaum marjinal Kolombia (Zolman, 2015, p. 167)

Keberadaan partai tradisional yaitu Konservatif dan Liberal yang telah mendominasi kursi pemerintahan bahkan sejak masa kemerdekaan Kolombia, menciptakan pengucilan bagi partai politik beraliran Marxis.

FARC sebagai kelompok yang mewakili partai Komunis dengan ideologi Marxisme-Leninisme merasa terabaikan dan tidak mendapatkan tempat dalam kursi pemerintahan. Hal ini kemudian mendorong FARC untuk dapat memperjuangkan hak-haknya, termasuk yang berkaitan dengan hak sipil dan politik sebagai contoh hak atas kebebasan berpendapat. Setiap individu dan kelompok berhak memperoleh kesetaraan, yaitu diperlakukan setara tanpa membedakan statusnya, termasuk perbedaan aliran politik didalam kursi pemerintahan juga berhak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi didalamnya.

## 3.) Mengakhiri konflik bersenjata, termasuk di dalamnya penyesuaian kehidupan dan keberlangsungan sosial para pasukan pemberontak kedalam masyarakat;

Penyelesaian konflik saat ini dianggap sebagai permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan. Kedua pihak baik FARC maupun Pemerintah memandang bahwa konflik yang telah terjadi secara berkepanjangan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi rakyat, terlebih terkait kerugian yang dialami para korban termasuk pengalaman traumatis dan kerugian berupa bentuk fisik seperti kerusakan dan kehilangan harta benda. Pemerintah Kolombia dalam hal ini telah mempertimbangkan dengan membentuk komisi kebenaran yang bertugas untuk menjalankan serangkaian ketentuan pada '*Legal Framework for Peace*'. Selain itu, terdapat pula Transitional Justice (TJ) yang dalam hal ini dengan ditandatanganinya Statuta Roma oleh Kolombia maka negara tidak diperbolehkan untuk memberikan amnesti bagi kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Isacson, 2014, p. 8). Berarti hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjamin keselamatan para korban dengan mengedepankan hak-haknya tanpa mengabaikan pentingnya penyesuaian hukuman bagi para pelaku, sehingga keduanya diharapkan dapat hidup damai secara berdampingan setelah berakhirnya PTA ini.

## 4.) Perdagangan ilegal tanaman dasar bahan baku narkoba dan narkoba (obat-obatan terlarang);

Aktivitas perdagangan narkoba seharusnya diminimalisir pasca berakhirnya konflik, namun hal tersebut tidaklah mudah untuk dapat diwujudkan. Pemerintah Kolombia merasa perlu untuk membuat kebijakan baru yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada produksi pertanian koka. Urgensi untuk mengakhiri pertanian tanaman-tanaman ilegal membutuhkan transformasi di pedesaan yang terstruktur. Pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan oleh pemerintah nantinya harus mampu mengatasi kondisi kemiskinan di masyarakat petani, dalam hal ini melalui fasilitasi infrastruktur, pendidikan, kebutuhan, dan pekerjaan kepada masyarakat secara partisipatif. Pihak FARC juga telah menyepakati untuk ikut berkontribusi dalam proses ini, tujuannya agar para petani di wilayah pedesaan tersebut secara sukarela dapat mengganti jenis tanaman yang akan di budidayakan dan di produksi kedepannya, sehingga jumlah produksi tanaman illegal seperti koka dapat berkurang komoditasnya (Eventon, 2016).

## 5.) Perbaikan hukum dan persiapan pemenuhan hak-hak para korban; dan

Berangkat dari pentingnya kesadaran pihak pemerintah dan FARC terkait hak-hak yang seharusnya dipenuhi untuk menjaga dan menjamin kehidupan para korban kedepannya. Dalam laporan WOLA yang ditulis oleh Adam Isacson (2014:6), disebutkan bahwa pada pelaksanaan perundingan baik pemerintah maupun pihak FARC baiknya tidak melupakan isu terkait korban konflik. Menurutnya para korban berhak mendapat pengakuan dan perlakuan bermartabat dari negara dan dari pelaku. Mereka layak untuk

mendapatkan reparasi secara individu maupun masyarakat, usaha untuk mendamaikan pelaku dengan korban juga perlu dilakukan sebab keduanya harus tetap hidup dalam komunitas yang sama. Untuk itu pemerintah menyadari betul upaya yang harus dilakukan dalam memenuhi hak-hak para korban yaitu, dengan mengimplementasikan ‘*victims law*’ sebagai upaya pemulihan korban dan menugaskan komisi kebenaran untuk menjalankan ‘*Legal Framework for Peace*’. Tugas komisi kebenaran yaitu harus mencakup kejahatan yang dilakukan oleh semua pihak, dan harus memiliki otonomi, anggaran, perlindungan, dan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaannya.

#### 6.) Implementasi final *Peace Talks Agreements*

Pemerintah Kolombia harus menjamin terwujudnya komitmen kedua pihak pada perjanjian yang diantaranya terdiri dari, 1) Perjanjian implementasi pembangunan wilayah pedesaan dan lahan pertanian bagi pihak oposisi dan kelompok marjinal; 2) Pelaksanaan operasi DDR (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration*) setelah disepakatinya perjanjian pada PTA untuk menjamin keamanan rakyat Kolombia pasca berakhirnya konflik; 3) Pembangunan dan penataan ulang tata kelola pemerintahan di daerah, sebagai representasi dari kekuasaan pemerintah pusat dan berfungsi sebagai pengatur kebijakan pada pemerintahan daerah (Isacson, 2014:11-16).

### **2.2.3. Biografi Juan Manuel Santos**

Juan Manuel Santos merupakan anak ketiga dari pasangan Enrique Santos Castillo dan Clemencia Calderon Nieto, yang mana Enrique Castillo sendiri merupakan keturunan dari seorang jurnalis sekaligus politikus Enrique Santos Montejó atau dikenal juga dengan nama Caliban. Caliban merupakan kakak dari Presiden Eduardo Santos Montejó (1938-1942). Keduanya merupakan anak keturunan dari ‘The Santander’<sup>8</sup>, Francisco Santos Galvis dan Leopoldina Montejó Camero.

Jurnalisme merupakan bidang yang sangat berkaitan erat dengan Enrique Santos (Caliban), sebab ia merupakan sastrawan yang mengawali kariernya sebagai seorang jurnalis. Sebelum menjalankan bisnisnya di ‘El Tiempo’, Caliban juga sempat mendirikan redaksi ‘La Linterna’ (ditutup pada 1919) dan bergabung dengan partai Liberal (El Partido Liberal Colombiano) pada tahun 1909. Selama berkarir sebagai seorang jurnalis, ia pernah meraih penghargaan ‘The Maria Moors Cabot Prize’ (1940). Kemudian sejak bergabung dengan partai Liberal, Caliban mulai menjajaki kariernya di dunia politik, seperti pada tahun 1939 ia sempat menjadi anggota dewan dan menjabat sebagai Duta Besar Kolombia untuk Chili (1949).

---

<sup>8</sup> Dalam laman Encyclopedia Wikipedia, disebutkan bahwa Santander merupakan sebuah wilayah yang berada di Kolombia tepatnya di Departemen Norte de Santander dimana kakek buyut dari Juan Manuel Santos lahir disana dan juga merupakan keponakan dari pahlawan Santander, yaitu Maria Antonia Santos Plata (1782-1819). Beliau merupakan seorang pahlawan wanita yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Kolombia. Maria Antonia mendukung gerakan pemberontakan ‘Coromoro’ yang berlangsung di Provinsi Socorro untuk melawan penjajah Spanyol dan memerangi rezim terror, serta mendukung pasukan patriot pada ‘The Liberation Campaign’ tahun 1819. [https://es.wikipedia.org/wiki/Antonia\\_Santos](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonia_Santos) . Diakses pada 11 Mei 2018.

Seperti yang diketahui, bahwa menjalankan perusahaan redaksi 'El Tiempo' merupakan aktifitas yang sangat melekat dengan keluarga Santos dan telah dilangsungkan selama turun-menurun. Pada awalnya 'El Tiempo' sendiri merupakan usaha yang bergerak dibawah kepemilikan Eduardo Santos, namun karena Eduardo tidak memiliki penerus (anak satu-satunya meninggal di usia anak-anak) maka perusahaan tersebut diwariskan kepada keturunan kakaknya (Hernando Santos Castillo dan Enrique Santos Castillo). Dan sejak saat itulah keluarga Caliban Santos secara turun-menurun mendedikasikan dirinya pada jurnalisme di Kolombia. Politik dan jurnalisme terlihat seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari silsilah keluarga Santos. Bahkan ia sendiri pada akhirnya mencoba untuk menggeluti karier di dunia politik, terlepas dari latar belakang pendidikannya yang lebih fasih dalam bidang ekonomi. Selain pendahulunya, Francisco Santos Calderon sebagai sepupu juga ikut terlibat didalam dunia politik. Francisco, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Kolombia pada periode tahun 2002-2010 (mendampingi Presiden Alvaro Uribe Velez). Francisco dan Santos sama-sama mengabdikan pada negara sebagai politisi yang ikut terlibat didalam kabinet pemerintahan Presiden Alvaro Uribe, dimana Santos pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2006-2010).

Keluarga dalam hal ini menjadi satu-satunya agen sosialisasi pertama yang paling berpengaruh dalam kehidupan Santos. Secara langsung maupun tidak Santos sudah mengenali politik sejak usia anak-anak, yaitu melalui tokoh perjuangan dan tokoh pemimpin politik yang muncul didalam lingkup keluarganya. Seperti kebanyakan anak kecil, pada umumnya mereka sangat mengidolakan kisah-kisah '*hero*' atau '*superhero*' dalam fantasi mereka. Kisah mengenai pahlawan ini bisa jadi merupakan tahapan awal bagi seorang anak dalam memahami nilai dan norma baik-buruk serta nilai keadilan. Sehingga dalam hal ini yang perlu dipahami adalah proses sosialisasi politik yang terjadi didalam keluarga Santos, yang mana hal itu dapat berpengaruh pada bagaimana cara dia menginterpretasikan sosok seorang pahlawan yang memiliki semangat juang dan menjunjung nilai keadilan. Selain itu dalam hal kepemimpinan, Santos juga memperoleh pembelajaran dari sikap ayahnya yang disiplin dan pekerja keras, dimana menurut dokumentasi kehidupannya dalam ([www.juanmanuelsantos.com](http://www.juanmanuelsantos.com), 2018) sejak kecil ia sudah dibiasakan untuk mengenali proses produksi berita dan koran 'El Tiempo' dengan tujuan agar ia memiliki rasa kepemilikan serta tanggung jawab terhadap usaha warisan dari leluhurnya yang harus dipertahankan.